

Koridor : Jawa
Fokus Kegiatan : IT

**USULAN PENELITIAN PRIORITAS NASIONAL MASTERPLAN PERCEPATAN DAN
PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011 – 2025**

(PENPRINAS MP3EI 2011-2025)



FOKUS/KORIDOR: IT

TOPIK KEGIATAN:

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN
DESA/KELURAHAN BERBASIS WEB MENDASARKAN PP.37 TAHUN 2004
UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA *GOOD GOVERNMENT* DAN
KINERJA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
(Survey Pada Seluruh Desa/Kelurahan Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya)**

TIM PENGUSUL:

Dr. Suryo Pratolo, SE., MSi., AkNIDN: 0526067501 (Ketua)
Dr. Ietje Nazaruddin, SE., MSi., Ak NIDN: 0516076503 (Anggota)
Haris Setyawan, ST., M.Eng NIDN: 0527036801 (Anggota)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
MARET 2013**

HALAMAN PENGESAHAN
PENPRINAS MP3EI

Judul Penelitian : Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Desa/Kelurahan Berbasis Web Mendasarkan PP No.37 Tahun 2004 Untuk Mendukung Terwujudnya *Good Government* Pemertintahan dan Kinerja Pemerintah Desa/Desa di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya.

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 562/Akuntansi

Koridor : Jawa

Fokus : IT

Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Suryo Pratolo, SE., MSi., Ak

b. NIDN : 0526067501

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Akuntansi

e. Nomor HP : 08179409758

f. Alamat surel (e-mail) : s_pratolo@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Ietje Nazaruddin, SE., MSi., Ak

b. NIDN : 0516076503

c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Haris Setyawan, ST., M.Eng

b. NIDN : 0527036801

c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lama Penelitian Keseluruhan : 2 tahun

Penelitian Tahun ke : 1

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp.

Biaya Tahun Berjalan : - diusulkan ke DIKTI Rp.
- dana institusi lain Rp.

Yogyakarta, 14 Maret 2013



Mengetahui,
Kepala LP3M
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Dr. Mukti Fajar ND, SH., M.Hum
NIDN: 0529096801

Ketua Peneliti


Dr. Suryo Pratolo, SE., MSi., Ak
NIDN: 0526067501

Menyetujui,
Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Prof. Dr. Bambang Cipto, MA
NIDN: 0011025801

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang Masalah	5
1.2. Tujuan Khusus	5
1.3. Urgensi (Keutamaan) Kegiatan	6
1.4. Luaran	6
1.5. Kontribusi Keilmuan	6
BAB 2 STUDI PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan	7
2.2. Tujuan Laporan Keuangan	7
2.3. Dasar Akuntansi	7
2.4. Transparansi, Akuntabilitas Sektor Publik serta Lingkungan yang mempengaruhi	8
BAB 3 PETA JALAN PENELITIAN	10
BAB 4 MANFAAT PENELITIAN	12
BAB 5 METODE PENELITIAN	13
BAB 6 BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN	15
6.1. Biaya	15
6.2. Jadwal Penelitian	15
DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN 1: Biodata Ketua dan Anggota	18
LAMPIRAN 2: Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas	27
LAMPIRAN 3: Justifikasi Anggaran Penelitian	29
LAMPIRAN 4: Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana	37

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini melakukan workshop tentang membuat laporan keuangan desa/kelurahan, model implementasi IT Terkait Aplikasi laporan Keuangan Desa/Kelurahan, membangun WEB terkait laporan keuangan Desa/Kelurahan di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang disebut (RKPDesa) adalah hasil musyawarah desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seorang kepala desa juga harus mendasarkan visi, misi dari seorang kepala desa terpilih. Kemudian kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Sesuai penjabaran di atas, pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas publik pada pemerintahan desa harus dapat diwujudkan dengan menerapkan sebuah sistem akuntansi pemerintahan desa yang *transparent* dan *accountable*. Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Pada penelitian ini, objek penelitian ada seluruh kelurahan/desa di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya. Adapun alasan dipilihnya desa/kelurahan di 5 (lima) ibu kota provinsi di Pulau Jawa, sebagai berikut: (1) Kelurahan sudah memiliki jaringan internet yang kuat, (2) SDM sudah baik, (3) infrastruktur lebih tertata, (4) pimpinan sudah mengenal IT, (5) Konsep pelayanan cepat sangat mendukung ibu kota provinsi ini sebagai pilot proyek. Disamping itu, peneliti juga akan membatasi pada Desa/kelurahan yang telah memiliki jaringan internet dan sumber daya yang baik, sehingga akan lebih aplikatif dan informatif terkait sistem informasi laporan keuangan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah: metode survey, spiral model, *Focus Group Discussion*, Implementasi Web Laporan Keuangan Desa untuk mendukung *good government* dan kinerja pemerintahan desa. Tujuan jangka pendek melakukan: Sosialisasi tentang laporan keuangan desa sesuai PP No.72 Tahun 2005, melakukan workshop tentang membuat laporan keuangan desa/kelurahan, memberikan workshop tentang teknologi informasi terkait laporan keuangan desa baik secara konvensional dan berbasis teknologi informasi, implementasi IT Terkait Aplikasi laporan Keuangan Desa/Kelurahan di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat mengimplementasi aplikasi sistem informasi akuntansi keuangan desa/kelurahan, diharapkan: membantu kesulitan kepala desa/kelurahan dalam hal membuat laporan keuangan desa/kelurahan, mempercepat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa/kelurahan, mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mewujudkan terciptanya pemerintahan yang *good government pemerintahan untuk desa/kelurahan*, mendukung adanya perencanaan anggaran desa (APBDes), mendukung terwujudnya kinerja pemerintahan yang lebih baik.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Fenomena umum dari sistem pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, secara tersirat bahwa seharusnya semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut hendaknya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah. Disamping itu, dukungan terhadap pemerintahan desa juga didukung pasal 212 pada ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, tentang desa dan keputusan Menteri Dalam Negeri (mendagri) Nomor 130 tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Dalam Negeri, yang intinya keuangan desa harus : transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang di sebut (RKPDesa) adalah hasil musyawarah desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seorang kepala desa juga harus mendasarkan visi, misi dari seorang kepala desa terpilih. Kemudian kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Sesuai penjabaran di atas, pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas publik pada pemerintahan desa harus dapat diwujudkan dengan menerapkan sebuah sistem akuntansi pemerintahan desa yang *transparent* dan *accountable*. Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Pada penelitian ini, objek penelitian ada seluruh kelurahan/desa di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya. Adapun alasan dipilihnya desa/kelurahan di 5 (lima) ibu kota provinsi di Pulau Jawa, sebagai berikut: (1) Kelurahan sudah memiliki jaringan internet yang kuat, (2) SDM sudah baik, (3) infrastruktur lebih tertata, (4) pimpinan sudah mengenal IT, (5) Konsep pelayanan cepat sangat mendukung ibu kota sebagai pilot projek. Disamping itu, peneliti juga akan membatasi pada Desa/kelurahan yang telah memiliki jaringan internet dan sumber daya yang baik, sehingga akan lebih aplikatif dan informatif terkait sistem informasi laporan keuangan tersebut. Pada penelitian ini unit analisisnya adalah desa/kelurahan yang telah memiliki jaringan internet dan fasilitas IT.

Laporan Keuangan Desa/kelurahan, secara prinsip masih banyak kelemahan, antara lain: (1) sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, (2) Masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman PP 32 Tahun 2004, (3) Masih lemahnya skill (ketrampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (4) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (5) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih konvensional(tradisional). Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengajukan judul:*Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Desa/Kelurahan Mendasarkan PP No.37 Tahun 2004 Untuk Mendukung Terwujudnya Good Government Pemerintahan dan Kinerja Pemerintah Desa/Kelurahan di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya.*

1.2.Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Melakukan Sosialisasi tentang laporan keuangan desa sesuai PP No.72 Tahun 2005. Di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya .

- b. Melakukan workshop tentang membuat laporan keuangan desa/kelurahan untuk perangkat desa/kelurahan di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya.
- c. Memberikan workshop tentang teknologi informasi terkait laporan keuangan desa baik secara konvensional dan berbasis teknologi informasi. Di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya .
- d. Implementasi IT Terkait Aplikasi laporan Keuangan Desa/Kelurahan di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya .
- e. Membangun WEB terkait laporan keuangan Desa/Kelurahan di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya .

1.3.Urgensi (Keutamaan) Kegiatan

Laporan Keuangan di tiap Desa/kelurahan di Pulau Jawa dan bahkan propinsi lainnya belumlah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adapun masalahnya peneliti merujuk hasil temuan penelitian dilakukan Supriyadi (2009), dimana dia meneliti tentang Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Sragen Jawa Tengah, sebagai berikut: **Pertama**, belum terbentuknya bendahara desa secara legal melalui keputusan kepala desa, selama ini bendahara desa dirangkap oleh kaur keuangan desa atau kaur umum. **Kedua** desa belum melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), sehingga arah pembangunan desa belum terlihat jelas untuk jangka waktu 1 tahun dan jangka waktu 5 tahun ke depan. **Ketiga**, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Badan Keluarga Berencana Pembedayaan Masyarakat dan Desa. Mendasarkan hal diatas, penelitian ini sangat mendukung untuk membantu pemerintahan desa/kelurahan dalam pemecahan pemecahan masalah tersebut terkait Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Desa/Kelurahan Berbasis Web Mendasarkan PP No.37 Tahun 2004 Untuk Mendukung Terwujudnya *Good Government* Pemerintahan dan Kinerja Pemerintah Desa/Desa di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya.

Dengan implementasi aplikasi sistem informasi akuntansi keuangan desa/kelurahan, diharapkan: membantu kesulitan kepala desa/kelurahan dalam hal membuat laporan keuangan desa/kelurahan, mempercepat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa/kelurahan, mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mewujudkan terciptanya pemerintahan yang *good government pemerintahan* untuk *desa/kelurahan*, mendukung adanya perencanaan anggaran desa (APBDes), mendukung terwujudnya kinerja pemerintahan yang lebih baik.

1.4.Luaran(Output)

Adapun luaran dari penelitian ini, diharapkan:

1. Kebijakan tentang implementasi sistem informasi keuangan desa/kelurahan Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.
2. Membuat Model Perancangan sistem informasi keuangan desa/kelurahan Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.
3. Prototipe sistem informasi keuangan desa/kelurahan Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya
4. Artikel pada jurnal nasional
5. Buku Ajar terkait Laporan Keuangan Desa/Kelurahan

1.5.Kontribusi Terhadap Ilmu

Adapun kontribusi penelitian ini terhadap keilmuan, meliputi: akuntansi keuangan daerah, manajemen keuangan daerah.

BAB 2 STUDI PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang berkembang cukup pesat akhir-akhir ini. Perkembangan ini mempengaruhi oleh meningkatnya perhatian dan tuntutan masyarakat akan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara negara. Menurut Nordiawan et all (2008 : 3) “Akuntansi Pemerintahan adalah pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah”. Menurut Ismaya (2006 : 307) “Akuntansi Pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat unit pemerintah”. Menurut Arifin dan Ghazali (2001 : 5) “Akuntansi Pemerintahan merupakan data akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*nonprofit organization*)”.

Jadi berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa akuntansi pemerintah adalah akuntansi untuk organisasi nirlaba (*Nonprofit organization*) yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan mencari laba.

2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Setiap sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki tujuan begitu juga dengan laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan dilihat dari beberapa pendapat. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah No. 01 tujuan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Ikatan Akuntansi Indoensia (2007: 3) “Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan”.

2.3 Dasar Akuntansi

Menurut Bastian (2007 :66) menyatakan “Dasar akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Dasar akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Terdapat empat macam dasar akuntansi yaitu, sebagai berikut :

- a. **Akuntansi berbasis kas:** Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah, yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas

dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana, dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk laporan Penerimaan dan Pengeluaran atau arus kas.

- b. **Modifikasi dari akuntansi berbasis kas:** Basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas, namun dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode tertentu misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan. Penerimaan dan Pengeluaran kas yang terjadi selama satu periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu. Arus kas pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.
- c. **Akuntansi berbasis akrual:** Akuntansi berbasis akrual berarti basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan.
- d. **Modifikasi dari akuntansi berbasis akrual:** Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun.

2.4. Transparansi, Akuntabilitas Sektor Publik serta Lingkungan yang mempengaruhi

2.4.1. Pengertian Transparansi

Salah satu unsur utama dalam pelaporan keuangan pemerintahan adalah transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut Mardiasmo (2002:30) pengertian transparansi adalah "Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat". Menurut Nordiawan (2006: 131) menyatakan "Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan". Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa transparansi suatu negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

2.4.2. Pengertian Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Arifin dan Ghozali (2001 :52) menyatakan "Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan". Menurut Mardiasmo (2002:29) mengatakan " Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut". Menurut Nordiawan (2006:35) mengatakan "Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik". Seperti yang telah dijabarkan dari beberapa definisi tersebut menurut Mardiasmo (2002:21) menjelaskan terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

- Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik.
- Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
- Akuntabilitas Program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan dapat ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah, baik Pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai pengertian akuntabilitas maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Surplus/Defisit, LRA, Neraca dan CaLK. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja *Financial* Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

2.4.3. Lingkungan yang mempengaruhi

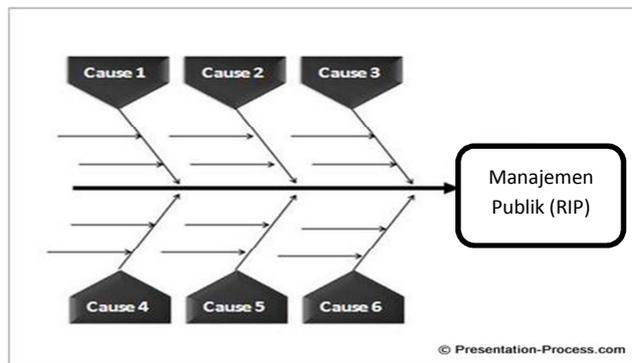
Untuk mencapai suatu tujuan, maka pengaruh lingkungan akan sangat mempengaruhi kesuksesan pencapaian tujuan tersebut. Lingkungan yang mempengaruhi pencapaian transparansi dan akuntabilitas suatu entitas adalah lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat dan memperlemah keefektifan transparansi dan akuntabilitas entitas atas wewenang dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya. Diantara faktor-faktor yang relevan dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat antara lain, yaitu :

- a. Falsafah dan konstitusi Negara
- b. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan
- e. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- f. Pengakuan hukum yang memadai
- g. Tingkat keterbukaan pengelolaan
- h. Sistem manajemen birokrasi
- i. Jangkauan pengendalian dan kompleksitas program

Kesembilan faktor tersebut tidak saling bertentangan akan tetapi saling mempengaruhi corak transparansi dan akuntabilitas secara simultan dan saling terkait satu dengan yang lainnya, sehingga diurai pengaruhnya tanpa mengaitkan satu faktor dengan faktor yang lain.

BAB 3 PETA JALAN PENELITIAN

Road Map Penelitian Berbasis RIP (Rencana Induk Penelitian)



1.	Suryo Pratolo (2006)	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau kerjasama PT Sinergi Visi Utama dan Bagian Organisasi Kabupaten Bintan Propinsi
2.	Suryo Pratolo, (2008)	Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Organisasional Manajer, Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara di Indonesia
3.	Suryo Pratolo, (2008)	Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Hubungannya dengan Perwujudan Keadilan dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah
4.	Suryo Pratolo, (2009)	Model Instrumen Manajemen Untuk Peningkatan Kinerja Instansi Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia
5.	Suryo Pratolo (2009)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Aktivitas Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial sebagai variabel Intervening (Studi Empiris pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB)
6.	Suryo Pratolo, (2010)	<i>Peran Good Government Governance Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Kepuasan Masyarakat di Era Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Global (Studi pada pemerintahan kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta).</i>

Model Perancangan Laporan Keuangan Berbasis IT

MANUAL PENGGUNAAN PROGRAM SIKADES UNTUK UNIT KERJA MEMULAI PROGRAM SIKADES DAN PENGISIANNYA

1. Buka/klik folder unit kerja (misalnya: 01.00 Kepala Desa) yang didalamnya terdapat file **Sikades4unit**
2. Buka/klik file **Sikades4unit** hingga muncul tampilan berikut:

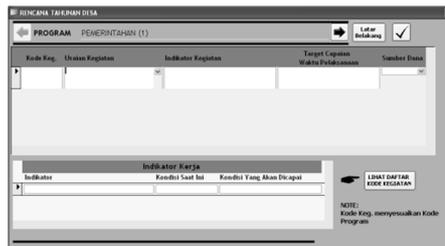
Catatan:

Isikan Nama user dan Password sesuai dengan informasi Nama user dan Password yang diberikan oleh petugas Admin

3. Setelah klik tombol **LOGIN** akan tampil main menu untuk unit kerja seperti berikut:



4. Klik tombol **Rencana Strategis** untuk mengisi informasi visi, misi dan tujuan, sesuai dengan dokumen visi, misi dan tujuan desa anda.
5. Klik tombol **Rencana Tahunan** untuk memilih Program, uraian kegiatan, dan mengisi indicator kegiatan, target capaian dan waktu pelaksanaan, sumber dana, dan indicator kerja. Contoh tampilan menu Rencana tahunan adalah seperti berikut:



6. Setelah rencana tahunan desa tentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan anggaran tiap kegiatan tersebut. Caranya dengan klik tombol **Anggaran** dari main menu untuk unit kerja. Tampilan awal menu anggaran adalah seperti berikut:



Pilih program kerja dan kegiatan yang akan disusun anggarannya, pada kolom penerimaan klik item penerimaan (bila kegiatan tersebut ada sumber penerimaannya), dilanjutkan dengan melengkapi isian kolom uraian, satuan, harga satuan dan kuantitas, selanjutnya tekan tombol **Enter**. Kemudian klik tombol **mutakhirkan data**, untuk refresh entri data yang telah dilakukan.

Selanjutnya pada kolom pengeluaran klik item pengeluaran, dilanjutkan dengan melengkapi isian kolom uraian, satuan, harga satuan dan kuantitas, selanjutnya tekan tombol **Enter**. Kemudian klik tombol **mutakhirkan data** untuk refresh entri data yang telah dilakukan.

Berikut adalah contoh tampilan untuk langkah di atas:



7. Untuk melihat tampilan rinci pendapatan/belanja/pembiayaan dengan cara klik tombol  dan untuk mencetak dengan cara klik tombol , dan bila akan keluar dari menu anggaran klik tombol .
8. Tombol **Informasi Saldo PAGU** digunakan untuk melakukan pengecekan pagu anggaran tersedia, ajuan anggaran yang telah dibuat dan sisa pagunya.
9. Klik tombol **Rekap Kegiatan** dan tombol **Rekap Keuangan** untuk melihat tampilan rekapitulasi kegiatan dan rekapitulasi keuangan dari anggaran yang telah disusun.
10. Untuk mengakhiri penggunaan program SIKADES untuk unit kerja klik tombol .

BAB 4

MANFAAT PENELITIAN

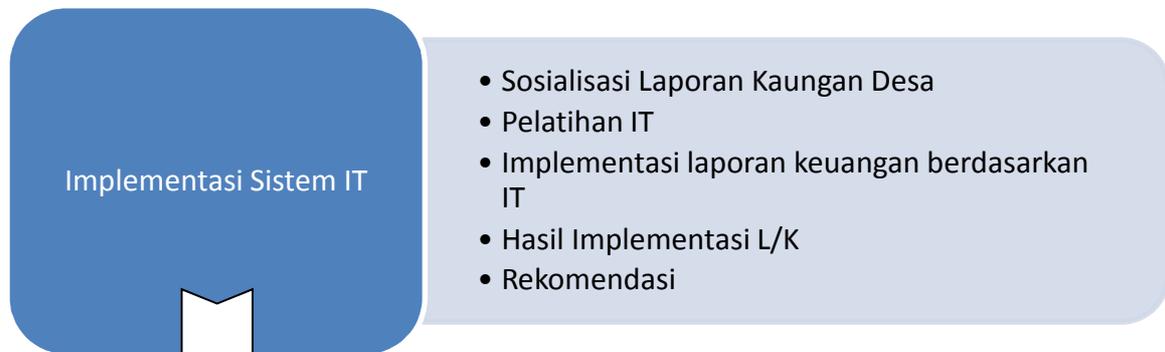
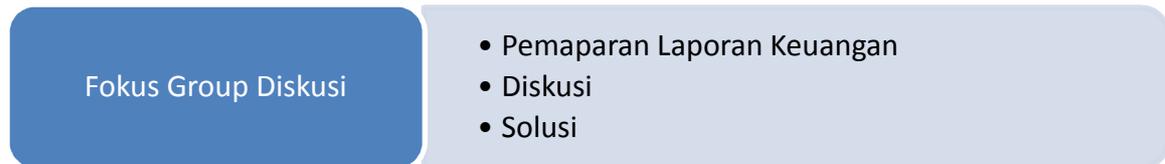
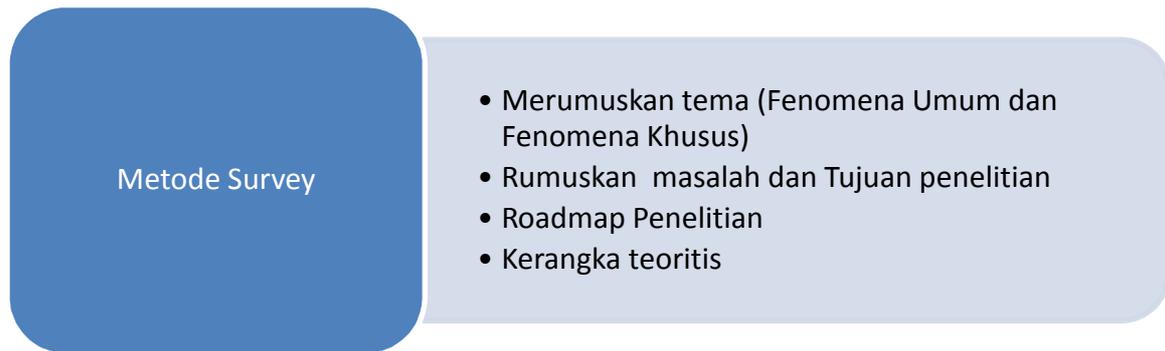
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Pendidikan:(Perguruan Tinggi)
Dari sudut pandang pendidikan, maka penelitian memiliki nilai manfaat:
 - a. Menunjang keilmuan di bidang akuntansi pemerintahan /Akuntansi Sektor Publik
 - b. Menunjang keilmuan di bidang Manajemen Keuangan Pemerintahan
 - c. Menunjang keilmuan di bidang Manajemen Pemerintahan

2. Manfaat Bagi Pemerintah Pusat/Daerah
 - a. Membangun grand desain untuk laporan keuangan desa
 - b. Mengembangkan potensi sumber daya pedesaan/kelurahan
 - c. Menunjang terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik
 - d. Mewujudkan terselenggaranya good government pemerintahan desa
 - e. Mewujudkan kecepatan pelayanan publik
 - f. Menunjang Perencanaan APBDes

3. Manfaat Bagi Desa
 - a. Peningkatan infrastruktur terkait IT
 - b. Masuknya internet Desa
 - c. Pelayanan lebih cepat
 - d. Tranparansi dan akuntabilitas semakin baik
 - e. Peningkatan knowledge tentang sistem laporan keuangan desa

BAB 5 METODE PENELITIAN

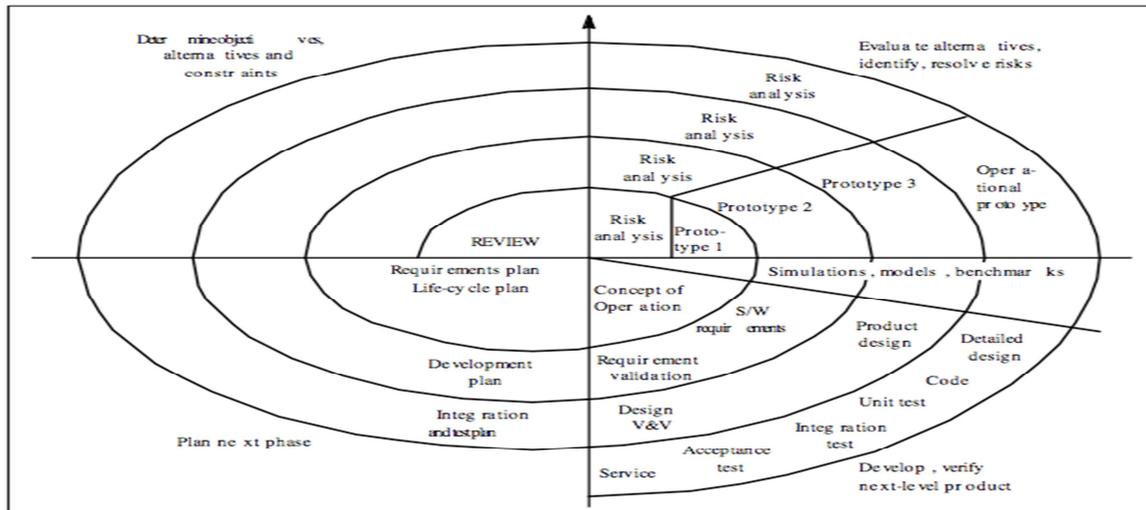


Proses pembuatan program aplikasi secara mandiri harus melalui tahapan yang terdiri dari :

- a. Analisis sistem yang sedang berjalan
- b. Analisis sistem yang akan dibangun dan kebutuhan Sistem
- c. Perancangan Sistem
- d. Pembangunan Program Aplikasi
- e. Pengujian Program Aplikasi
- f. Implementasi Sistem
- g. Pemeliharaan Sistem

PRODUK:

- Model Perancangan
- Model Implementasi
- Software Laporan Keuangan berbasis IT
- Buku Ajar
- Artikel Ilmiah



**Gambar
Spiral Model**

Proses digambarkan sebagai spiral. Setiap loop mewakili satu fase dari software process. Loop paling dalam berfokus pada kelayakan dari sistem, loop selanjutnya tentang definisi dari kebutuhan, loop berikutnya berkaitan dengan desain sistem dan seterusnya. Setiap Loop dibagi menjadi beberapa sektor :

1. *Objective settings* (menentukan tujuan)

Menentukan tujuan dari fase yang ditentukan. Batasan-batasan pada proses dan produk sudah diketahui. Perencanaan sudah disiapkan. Resiko dari proyek sudah diketahui. Alternatif strategi sudah disiapkan berdasarkan resiko-resiko yang diketahui, dan sudah direncanakan.

2. *Risk assessment and reduction* (Penanganan dan pengurangan resiko)

Setiap resiko dianalisis secara detil pada sektor ini. Langkah- langkah penanganan dilakukan, misalnya membuat *prototype* untuk mengetahui ketidakcocokan kebutuhan.

3. *Development and Validation* (Pembangunan dan pengujian)

Setelah evaluasi resiko, maka model pengembangan sistem dipilih. Misalnya jika resiko user interface dominan, maka membuat *prototype user interface*. Jika bagian keamanan yang bermasalah, maka menggunakan model formal dengan perhitungan matematis, dan jika masalahnya adalah integrasi sistem model *waterfall* lebih cocok.

4. Planning

Proyek dievaluasi atau ditinjau-ulang dan diputuskan untuk terus ke fase loop selanjutnya atau tidak. Jika melanjutkan ke fase berikutnya rencana untuk loop selanjutnya.

BAB 6
BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN

6.1. Ringkasan Anggaran Biaya

Tabel: 2
Ringkasan Anggaran Biaya MP3I Yang di Ajukan Setiap Tahun

No	Komponen	Biaya Yang diusulkan (Rp)	
		Tahun I	Tahun II
1	Gaji dan Upah (Maksimum 30%)	59.535.000	59.535.000
2	Bahan Perangkat/Penunjang (30%-40%)	77.200.000	77.200.000
3	Perjalanan (15%-20%)	36.570.000	36.570.000
4	Lain-Lain: (Pengolahan Data, Laporan, Publikasi Dalam Jurnal, Menghadiri Seminar, Pendaftaran HKI) Maksimum 15%	23.242.000	23.242.000
Jumlah		196.547.000	196.547.000

Perhitungan lengkap lihat pada lampiran

6.2. Jadwal Penelitian

Tabel:3
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

TAHUN I (PERTAMA)

URAIAN KEGIATAN	Januari – Oktober 2014																																							
	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I. PERSIAPAN																																								
1. Perijinan Lokasi Penelitian	■	■	■																																					
2. Observasi dan Wawancara				■	■	■	■																																	
3. Penyusunan dan Penyebaran Kuesioner				■	■	■	■																																	
II. PELAKSANAAN																																								
1. Pengumpulan Data Lapangan					■	■	■	■	■																															
2. Analisis Sistem						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
3. Pemodelan										■	■	■	■	■	■	■																								
4. Disain database																																								
5. Perancangan Prototipe Aplikasi																																								
6. Uji prototipe																																								
7. Implemetasi prototipe Aplikasi																																								

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin dan Ghozali Imam. 2001. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ismaya, Sujana. 2006. *Kamus Standar Akuntansi*. Jakarta: Pustaka Grafika
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: salemba Empat
- Nordiawan, Deddi, Putra I.S, Rahmawati Maulidah. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supriyadi. 2009, Thesis-UNS-Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi-S.4307103-2010 tentang Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Sragen.
- Suryo Pratolo. 2008. *Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Organisasional Manajer, Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*, **Jurnal Akuntansi dan Investasi-UMY, Januari 2008, ISSN 1411-6227**
- Suryo Pratolo. 2010. *Peran Good Government Governance Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Kepuasan Masyarakat di Era Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Global (Studi pada pemerintahan kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Dipresentasikan pada **SIMPOSIUM RISET EKONOMI IV** yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur dan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 18 Februari 2010
- Suryo Pratolo. 2009. *Model Instrumen Manajemen Untuk Peningkatan Kinerja Instansi Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia: didanai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas*, dipresentasikan pada Seminar Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia
- Suryo Pratolo. 2009. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Aktivitas Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial sebagai variabel Intervening (Studi Empiris pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB)*; ditulis bersama Mudie Wahyudi; Majalah Ilmiah **NERACA STIE MUHAMMADIYAH PEKALONGAN, Desember 2009. ISSN: 1829-8648**
- Suryo Pratolo. 2008. *Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Hubungannya dengan Perwujudan Keadilan dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, **Jurnal Akuntansi dan Investasi-UMY; Juli 2008; ISSN 1411-6227**
- Suryo Pratolo. 2006. *Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau kerjasama PT Sinergi Visi Utama dan Bagian Organisasi Kabupaten Bintan Propinsi Penelitian Hibah A2 DIKTI DEPDKNAS*.

Lampiran 1. Biodata ketua dan anggota

Ketua



CURICULUM VITAE

Nama: Dr. Suryo Pratolo, SE., M.Si., Akt., AAP-A
Tempat/Tgl Lahir: Sleman; 26 Juni 1975
Alamat: Pogung Dalangan SIA XVI/Rt.10/No. 277-B
HP: 081 7940 9758
e_mail: s_pratolo@yahoo.com dan suryo@umy.ac.id
NPWP: 24.205.726.3-542.000

PENDIDIKAN

S3: Program Doktor, Pascasarjana Ekonomi/BKU Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung (2002-2006)
S2: Program Magister Sains, Pascasarjana Ekonomi/Akuntansi Universitas Gadjah Mada (1999-2001)
S1: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1995-1999)

SERTIFIKASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Ahli Akuntansi Pemerintahan A sesuai surat IAI no: 0468/DE/IAI/VII/2012

PEKERJAAN:

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak tahun 2000

JABATAN FUNGSIONAL:

Lektor/IIIC

Saat ini sedang proses Lektor Kepala (proses dudah di Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan DITJEN DIKTI Kemdikbud sesuai surat dari Kopertis Wil V no: 2045/K5?KP/2012)

KURSUS/TOT:

1. Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan IAI, April 2012
2. Kursus dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Nasional, diselenggarakan oleh BAPPENAS bekerjasama dengan Jurusan Teknik Industri UNS, Juni 2008
3. Pelatihan Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas, 2007
4. TOT Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2003
5. TOT Anggaran Berbasis Kinerja Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2003

PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH:

1. Penerapan Model Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi Yang Baik Untuk Mewujudkan Good University Governance (Studi Pada PTM se Indonesia). Penelitian Didanai LP3M UMY, tahun 2012
2. Strategi Pengajaran Audit Dalam Membekali Lulusan Akuntansi Untuk Menjadi Akuntan Dan Auditor Pemerintahan Yang Handal menuju Terciptanya *Good Governance*. Dipaparkan pada Seminar Audit Sektor Publik, Himunan Mahasiswa Akuntansi FE UMY, 19 Maret 2011.
3. Peran *Good Government Governance* Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Kepuasan Masyarakat di Era Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Global (Studi pada pemerintahan kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta). Dipresentasikan pada **SIMPOSIUM RISET EKONOMI IV** yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur dan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 18 Februari 2010.
4. Model Instrumen Manajemen Untuk Peningkatan Kinerja Instansi Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia: 2009 didanai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, sipresentasikan pada Seminar Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia
5. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Aktivitas Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial sebagai variabel Intervening (Studi Empiris pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB); ditulis bersama Mudie Wahyudi; Majalah Ilmiah **NERACA STIE MUHAMMADIYAH PEKALONGAN**, , **Desember 2009. ISSN: 1829-8648**
6. Pengaruh Kualitas Auditor, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan dan *Debt Default* Terhadap Kemungkinan Penerimaan Audit *Going Concern*; Ditulis bersama Karyanti, **Jurnal Akuntansi dan Investasi-UMY: 2009 ISSN 1411-6227**
7. Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Hubungannya dengan Perwujudan Keadilan dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, **Jurnal Akuntansi dan Investasi-UMY; Juli 2008; ISSN 1411-6227.**
8. Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Organisasional Manajer, Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, **Jurnal Akuntansi dan Investasi-UMY, Januari 2008, ISSN 1411-6227.**
9. Penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Blora: 2008
10. Pengetahuan Anggaran dan Efektivitas Partisipasi Dalam Hubungannya Dengan Kepuasan Atas Pelaksanaan Anggaran Kinerja (Studi Empiris Kabupaten Bantul), ditulis bersama Anton Ryadi, **Jurnal Akuntansi dan Investasi-UMY, Juli 2007 ISSN 1411-6227**
11. Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai variabel eksogen serta tinjauannya pada jenis perusahaan. Dipaparkan pada Simposium Nasional Akuntansi X di UNHAS MAKASSAR, **26-28 Juli 2007**
12. Penyusunan Bank Indikator Kinerja kerjasama Pemerintah Gunung Kidul dan PT Sinergi Visi Utama: **2007**
13. Penelitian Hibah Bersaing DIKTI DEPDIKNAS: Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Manajer, Pengendalian Intern terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Kinerja BUMN di Indonesia: **2007**
14. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau kerjasama PT Sinergi Visi Utama dan Bagian Organisasi Kabupaten Bintan Propinsi Penelitian Hibah A2 DIKTI DEPDIKNAS: Pengaruh persepsi pengembang terhadap *good governance* Pemda & Komitmen aparat terhadap kepuasan dan kinerja pengembang, **2006**

15. Kepulauan Riau, **2006**
16. Pengaruh Persepsi Pengembang perumahan terhadap *Good Governance* Pemda terhadap Kinerja Organisasional Pengembang; *Jurnal Utilitas*, **2005**
17. Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Bentuk Reformasi Keuangan Pemerintah Daerah; *Jurnal Utilitas*, **2004**
18. Analisis Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (survei pada pengembang di DIY); *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, **2003**
19. Analisis Kemandirian Daerah (Studi Kasus PemKab dan Pemkot di Provinsi DIY); *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, **2003**
20. Pengaruh Publicnes Pada Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Manajerial; *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, **2002**
21. *Double Entry BookKeeping* dan *Accrual Basis* Sebagai Pendukung Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik; *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, **2001**

PENGALAMAN KERJA & ORGANISASI:

1. Wakil Dekan FE UMY (2008-2011)
2. Direktur CV. SupraDianMandiri (Perusahaan Konsultan Akuntansi & Manajemen berbasis TI)
3. Asesor Badan Akreditasi Nasional, Departemen Pendidikan Nasional (2007-sekarang)
4. Anggota Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi DIY (2010-sekarang)
5. Tim Pemantau Independen UNAS SMP-MTs Bantul Yogyakarta, 2010
6. Peneliti dan Trainer pada Kantor Konsultan Supra-Center Yogyakarta (2008-sekarang)
7. Asisten Biro Keuangan UMY (2004)
8. Tim Task Force Keuangan UMY (2003)
9. *Residence Consultant* Penatausahaan Keuangan Daerah Regional Jateng-DIY Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (2003-2005)
10. Koordinator Lab Akuntansi FE UMY (2006-2008)
11. Pendamping Penataan Keuangan Daerah untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2003-2005)
12. Anggota Forum Fasilitator Keuangan Daerah Ditjen Otda Depdagri (2003-2006)
13. Tim Ahli Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Jakarta (2004-2008)
14. Tim Ahli Keuangan Daerah PT Sinergi Yogyakarta (2001-2007)

Yogyakarta, Maret 2013



(Dr. Suryo Pratolo, SE., M.Si., Akt, AAP-A)

CURRICULUM VITAE

14/03/2013

Dr. Ietje Nazaruddin SE., M.Si., Ak.



- Doktor pada Program Doktor Ilmu Ekonomi bidang Ilmu Akuntansi
- Registered Accountant
- Bidang Keahlian:
Akuntansi Manajemen, Sistem Pengendalian Manajemen, Akuntansi Keperilakuan
- Telp. : 08562853239/0274376654
- Kantor : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Email : ietje_effendi@yahoo.com.sg

DATA PRIBADI

Nama : DR. Ietje Nazaruddin M.Si. Akt.
Tempat/Tanggal Lahir : Plaju, 15 Juli 1965
Pangkat : Lektor
NIK/NIDN : 143025/0516076503
No. Registrasi Pendidik : 11105100705354
Alamat Rumah : Jalan Golo Gang Nenggolo No 36 A RT 003/RW 001 Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta 55161
Telp: (0274)376654; 08562853239

Alamat Kantor : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Barat, Taman Tirto, Kasihan Bantul Yogyakarta 55183.
Telp: (0274) 387656 Ext 174 Fax (0274) 387646

PENDIDIKAN

2006-2011 : Program Doktor Universitas Diponegoro Semarang
1996-1998 : Program Pasca Sarjana UGM (Akuntansi)
1984-1989 : Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UII
1981-1984 : SMAN 3 Yogyakarta
Register Negara Akuntan : D-46.903

PENGALAMAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN

- 2012- sekarang : **Ketua Jurusan Akuntansi** Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 2011- sekarang : **Dosen pada Program Magister Manajemen** Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 2008-sekarang : **Dosen pada Program Magister Manajemen Rumah Sakit** Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 2004-2008 : **Kepala devisi kendali mutu keuangan-** Badan Penjaminan Mutu UMY
- 1998-1999 : **Ketua Jurusan Akuntansi**
- 1993- sekarang : **Dosen Tetap Program Studi Akuntansi** Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 2010 – sekarang : **Anggota Ikatan Akuntan Indonesia**
- 2009 : **Anggota Asosiasi Dosen Akuntansi** Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- 2012 : **Koordinator Bidang Acara 1st International Conference On Sustainable Innovation 2012**
- 2011 : **Ketua Tim Rekrutmen Dosen Akuntansi** Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 2007 : **Ketua Panitia Pelaksanaan Pengadaan Equipment (ISS)** pada Proyek TPSDP UMY
- 2006 s/d 2007 : **PIC pada program TPSDP untuk Quality Assurance**
- 2005/2006 : **Sekretaris Komite Anggaran UMY**
- 2004/2005 : **Sekretaris Komite Anggaran UMY**
- 2004-2005 : **Ketua Task Force Sistem Keuangan UMY**

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 2012 : ***Instruktur Pelatihan Perjalanan Dinas*** - Otda Konsultan
- 2011 : ***Narasumber “Workshop Penyusunan Silabi Prodi Zakat dan Pajak – UIN Sunan Kalijaga***
- 2011 : ***Instruktur Pelatihan Manajemen Koperasi*** - Mieta Consultant dan Training Center
- 2011 : ***Tim Penyusunan Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY-*** Provinsi DIY
- 2011 : ***Pembina Kegiatan Belajar Menulis*** Yogyakarta
- 2010 : ***Sertifikasi Microsoft Office, excel, power point*** - Training Center Biro Sistem Informasi, UMY
- 2008 : ***Instruktur Workshop Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Yang Berkelanjutan*** - e-Gov Yogyakarta
- 2008 : ***Instruktur Workshop Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Yang Akuntabel Dengan Pendekatan Kinerja*** - e-Gov Yogyakarta

- 2008 : *Instruktur Workshop Teknik Penyusunan Anggaran Perguruan Tinggi Dengan Pendekatan Kinerja* - e-Gov Yogyakarta
- 2008 : *Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Jaminan Mutu Akademik STTNAS Yogyakarta*, Yogyakarta

PELATIHAN DAN SEMINAR YANG PERNAH DIKUTI

- 2010 : Simposium Akuntansi I . "Membangun Budaya Riset Untuk Meningkatkan Kualitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah"- *Asosiasi Program Studi Akuntansi PTM Se-Indonesia*
- 2009 : Kolokium Nasional Program Doktor - *Program M.Si Dan Doktor Ilmu-Ilmu Ekonomi FEB UGM*
- 2009 : Seminar Sosialisasi Kode Etik Profesi Akuntan Publik - *Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Sekretariat Jendral Departemen Keuangan dan UKSW Salatiga*
- 2007 Internship Program Dalam Rangka Memperdalam Measuring Customer Satisfaction, *PPM Fakultas Ekonomi UGM*
- 2006 Pelatihan Audit Mutu Akademik Internal, *Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi*
- 2006 : Workshop Metoda Penelitian Kualitatif, Eksperimental Dan Kuantitatif Menggunakan Structural Equation Modeling Dengan Teknik Partial Least Square - *Program Hibah Kompetisi A-2 Jurusan Akuntansi FE-UMY*
- 2006 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, *BPM-UII*
- 2005 : Simposium Nasional Akuntansi VIII - *Kompartemen akuntan pendidik dan FE UNS*
- 2005 : Seminar Nasional & Diskusi Panel Pelaporan Keuangan Perguruan Tinggi - *Universitas Surabaya dan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik*
- 2005 : Workshop Metoda dan Media Pengajaran - *Program Hibah Kompetisi A-2 Jurusan Akuntansi FE-UMY*
- 2004 : Workshop Internal Audit (ISO 9001:2000) Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Laboratorium Studi Manajemen, *Departemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*
- 2004 : Seminar dan Lokakarya Penjaminan Mutu (Quality Assurance) pendidikan tinggi *UGM*
- 2004 : Pelatihan Emotional & Spritual Quation Hibah Kompetisi Program A1 Dirjen Dikti, *Jurusan IESP Fakultas Ekonomi UMY*
- 2004 : Workshop Metodologi Penelitian *Program Hibah Kompetisi A1 Dirjen Dikti Jurusan IESP Fakultas Ekonomi UMY*
- 2004 : Seminar Nasional Isu Aktual Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis *Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- 2004 : Lokakarya Nasional Metode Eksperimen Untuk Behavioral *FE UII dan IAI cabang Yogyakarta Accounting Research*
- 2002 : Seminar Nasional Kurikulum Nasional Pendidikan Tinggi Akuntansi, *PPA-FE UGM dan IAI Kompartemen Akuntan Pendidik*

PENGALAMAN PENELITIAN DAN PENYUSUNAN KARYA ILMIAH

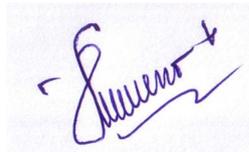
- 2011 : Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Motivasi, Desentralisasi Dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Akuntansi dan Investasi, volume 12 No 2, Juli 2011, ISSN 1411-6227*
- 2009 : Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility Disclosure) pada laporan tahunan (studi empiris pada perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek Indonesia), *Jurnal Akuntansi dan Investasi, Volume 10 No 2, Juli 2009, ISSN 1411-6227*
- 2008 : Corporate Governance Dan Kinerja Perusahaan, *Jurnal Akuntansi dan Investasi, Volume 9 No 2, Januari 2008, ISSN 1411-6227*
- 2008 : Persepsi Mahasiswa Terhadap Profesi Akuntan dan Dampaknya pada program studi akuntansi, *Jurnal Akuntansi dan Investasi, Volume 9 No 1, Januari 2008, ISSN 1411-6227*
- 2005 : Pengaruh Customization dan Interdependensi terhadap karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen Broad Scope dan Aggregation *Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 6 No. 2 Juli 2005, terakreditasi nomor 34/DIKTI/Kep/2003*
- 2003 : Desentralisasi, Sistem Pengendalian Akuntansi dan Kinerja Organisasi (studi empiris pada organisasi sektor publik propinsi DIY, *Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 4 No. 2 Juli 2003, Terakreditasi nomor 34/DIKTI/Kep/2003*
- 2000 : Pengukuran kinerja non finansial suatu cara meningkatkan "Value" perusahaan, *Jurnal Utilitas, No 10 tahun ke – 8/2000 ISSN: 0854-47610*
- 1998 : Pengaruh Desentralisasi dan Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen terhadap kinerja manajerial, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol1 No. 2, Juli 1998*
- 2010 : Persepsi Etis Mahasiswa dan profesional terhadap Praktik Earnings Management Ditinjau Dari Faktor Jenis Manipulasi (Type Of Manipulation), Arah Manipulasi (Direction Of Manipulation), Materialitas (Materiality) Dan Kecenderungan (Intention) Dari Earnings Management, *LP3M UMY*
- 2010 : Studi Eksperimen Pengaruh Ideologi Etis, Personal Benefit dan Komitmen Profesional Terhadap Perilaku Earnings Management *Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional*
- 2009 : Metode Pembelajaran Akuntansi Manajemen Dengan Muatan Softskills *PHKI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- 2007 : Pengaruh Religiusitas, Gender Dan Moral Reasoning Terhadap Perilaku Etis, *Program Hibah Kompetisi A-2 Jurusan Akuntansi FE-UMY*
- 2005 : Metode Pembelajaran Akuntansi Manajemen Dengan Cooperative Learning, *Program Hibah Kompetisi A-2 Jurusan Akuntansi FE-UMY*
- 2003 : Pengaruh Desentralisasi Terhadap Kinerja (Studi Perbandingan Pada Organisasi Berorientasi Laba Dan Organisasi Nirlaba), *LP3M-UMY*
- 2002 : Pengaruh Struktur Organisasi dan visi Manajer Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial, *LP3M-UMY*
- 2002 : Penelitian Dosen Muda Desentralisasi, Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Kinerja Organisasi (Studi Empiris Pada Organisasi Sektor Publik Provinsi DIY), *Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen*

Pendidikan Nasional

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam **Curriculum Vitae** ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Yogyakarta, Maret 2013

Yang menyatakan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ietje Nazaruddin', written in a cursive style.

(Dr. Ietje Nazaruddin SE., M.Si., Ak)
143025/0516076503

IDENTITAS DIRI

Nama : Haris Setyawan
 Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 11 Nopember 1969
 Alamat : Tanjung, Barepan , Cawas, Klaten
 Status Perkawinan : Kawin
 Agama : Islam
 Telepon : 085867038868
 E-mail : nestyawan@yahoo.com
 Golongan/Pangkat : IIIA/ Asisten Ahli
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

TAHUN LULUS	JENJANG PENDIDIKAN	PERGURUAN TINGGI	JURUSAN DAN BIDANG
1999	S1	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Teknik Elektro, Komputer dan Informatika
2010	S2	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu-ilmu Teknik, Sistem Komputer dan Informatika

PELATIHAN-PELATIHAN

TAHUN	NAMA PELATIHAN	PENYELENGGARA	WAKTU
2001	Workshop PHP dan MySQL	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	4 hari
2010	TOT Relational Database and Design	NIIT-Center UMY	6 hari
2010	TOT Database Implementation and Administration	NIIT-Center UMY	6 hari
2010	TOT Office Productivity Tools	NIIT-Center UMY	6 hari
2011	TOT Mobile Application Development	NIIT , New Delhi	6 hari

Yogyakarta, Maret 2013



Haris Setyawan, ST. M.Eng

LAMPIRAN 2:

Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/Minggu)	Uraian Tugas
1	Dr.Suryo Pratolo., SE., MSi., Ak (Ketua Peneliti)/0526067501	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Ekonomi/Akuntansi	10 Jam/Minggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan terkait rencana penelitian di lima kota 2. Mengarahkan terkait job descvription kepada anggota terkait kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota 3. Mengkoordinasi terkait seluruh kegiatan yang dilakukan dengan tim peneliti 4. Mengatur strategi evaluasi terkait kegiatan penelitian 5. Memutuskan tentang masalah dan kesulitan di lapangan dan evaluasinya. 6. Mengundang rapat tim survey lapangan 7. Memberikan arahan terkait kuesioner, tabulasi data, arahan terkiat laporan hasil
2	Dr. Ietje Nazaruddin., SE.,MSi., Ak (anggota Peneliti)/0516076503	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Ekonomi/Akuntansi	10-12 Jam/Minggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan seluruh kegiatan penelitian baik di dalam maupun di lapangan 2. Mengkoordinasikan kegiatan menyusun kuesionerl 3. Mengkoordinasikan menyebar kuesioner di lapangan.(Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan surabaya) 4. Sebagai koordinator di lapangan baik suver data sekender maupun data primer. 5. Mengarahkan dalam tabulasi data lapangan. 6. Merumuskan kegiatan Diskusi antara pemerintah, akademik dan industri 7. Merumuskan laporan hasil
3	Haris Setyawan, ST., M.Eng (anggota peneliti)/ 0527036801	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Teknik/Teknologi Informasi	10-12 Jam/Minggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan masalah perancangan IT terkait produk kuliner di kota: jakarta, bandung, Semarang, Yogyakarta dan surabaya. 2. Merumuskan teori terkait model perancangan terkail industri kuliner di 5 kota jakarta, bandung,

					<p>Semarang, Yogyakarta dan surabaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Membantu ketua dalam mengkoordinasi survey dilapangan untuk kota jakarta, bandung, Semarang, Yogyakarta dan surabaya. 4. Sebagai koordinator dalam surevy untuk kota jakarta, bandung, Semarang, Yogyakarta dan surabaya 5. Mebantu menyelesaikan laporan Hasil penelitian 6. Membantu merumuskan WEB 7. Merancang Teknologi Informasi terkait IT untuk kota jakarta, bandung, Semarang, Yogyakarta dan surabaya
--	--	--	--	--	---

Ketua Peneliti

Dr.Suryo Pratolo., SE., MSi., Ak

Anggota Peneliti 1

Dr. Ietje Nazaruddin., SE.,MSi., Ak

Anggota Peneliti 2

Haris Setyawan, ST., M.Eng

Lampiran 3:
Justifikasi Anggaran Penelitian

1. Gaji dan Upah

Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu(Jam/Minggu)	Minggu	Honor Per Tahun (Rp)	
				Tahun I	Tahun II
Ketua	280.000	3	21	17.640.000	17.640.000
Anggota 1	190.000	3	21	11.970.000	11.970.000
Anggota 2	190.000	3	21	11.970.000	11.970.000
Tenaga Teknisi	95.000	3	21	5.985.000	5.985.000
Tenaga Survey dan Pemetaan:	190.000	3	21	11.970.000	11.970.000
Jumlah				59.535.000	59.535.000

2. Bahan perangkat/penunjang

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Honor Per Tahun (Rp)	
					Tahun I	Tahun II
Kertas	a. Membuat Draft Surat Kedinas/Departemen terkait/walikota/Institusi saat survey b. Membuat Draft Kuesioner c. Membuat draft proposal d. Membuat Draft Laporan e. Membuat Laporan Finish	5	Rim	32.000	160.000	160.000
Printer	a. Ngeprint Draft Surat Kedinas/Departemen terkait/walikota/Institusi saat survey	2	unit	1.200.000	2.400.000	2.400.000

2. Bahan perangkat/penunjang						
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Honor Per Tahun (Rp)	
					Tahun I	Tahun II
	b. Ngeprint Draft Kuesioner c. Ngeprint draft proposal d. Ngeprint Draft Laporan e. Ngeprint Laporan Finish					
Tita Hitam	a. Ngeprint Draft Surat Kedinas/Departemen terkait/walikota/Institusi saat survey b. Ngeprint Draft Kuesioner	6	unit	30.000	180.000	180.000
Tinta Merah	c. Ngeprint draft proposal	3	unit	30.000	90.000	90.000
Tinta Kuning	d. Ngeprint Draft Laporan	3	unit	30.000	90.000	90.000
Tinta Biru	e. Ngeprint Laporan Finish	3	unit	30.000	90.000	90.000
ATK (Jilid, Meja, Sewa Ruang, Sepedol, dll) untuk 5 Kota	a. Sewa Gueshouse/Ruang utk 5 Kota b. Jilid Paper c. Bolpoint/ d. Pensil e. Meja kecil untuk kerja	5	kota	2.400.000	12.000.000	12.000.000
FD(8 GB)	Beli FD dan GB	5	buah	180.000	900.000	900.000
CD	Beli CD	100	buah	5.000	500.000	500.000
Photo copy Kuesioner	Photo Copy Kuesioner	11000	lembar	300	3.300.000	3.300.000
Biaya Jilid	Jilid draft	5	unit	75.000	375.000	375.000
Biaya Penyebaran Kuesioner	Penyebaran Kuesioner ke jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya	5	kota	4.800.000	24.000.000	24.000.000
Pulsa Untuk Koordinator lapangan	Koordinator Survey untuk 5 kota jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya	2	orang	300.000	600.000	600.000

2. Bahan perangkat/penunjang						
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Honor Per Tahun (Rp)	
					Tahun I	Tahun II
Pulsa untuk anggota	Pulsa untuk kegiatan anggota untuk 5 kota jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya	10	orang	60.000	600.000	600.000
Pulsa untuk Mahasiswa	Pulsa untuk koordinator mahasiswa dilapangan untuk untuk 5 kota jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya	5	buah	200.000	1.000.000	1.000.000
Modem	Internet (Modem)	5	buah	375.000	1.875.000	1.875.000
Pulsa Modem	Pulsa Modem	10	paket	100.000	1.000.000	1.000.000
Kamera	Alat untuk survey di lapangan dan untuk foto grafer sebagai dokumen	3	unit	2.200.000	6.600.000	6.600.000
Handycam	Alat untuk survey di lapangan dan untuk foto grafer sebagai dokumen	2	unit	3.500.000	7.000.000	7.000.000
Pita Handycam	Alat untuk survey di lapangan dan untuk foto grafer sebagai dokumen	2	unit	60.000	120.000	120.000
Baterai	Alat untuk survey di lapangan dan untuk foto grafer sebagai dokumen	2	unit	35.000	70.000	70.000
Cetak Foto	Alat untuk survey di lapangan dan untuk foto grafer sebagai dokumen	250	lembar	1.000	250.000	250.000
Albun Fotho	Alat untuk survey di lapangan dan untuk foto grafer sebagai dokumen	5	buah	50.000	250.000	250.000
Hardisk	Alat untuk survey di lapangan dan untuk foto grafer sebagai dokumen	2	unit	500.000	1.000.000	1.000.000
Kaos TIM Reserach	Alat untuk survey di lapangan dan untuk untuk Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya	13	buah	50.000	650.000	650.000
Topi Tim Research	Alat untuk survey di lapangan dan untuk untuk Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya	13	buah	20.000	260.000	260.000
Tas Tim reserach	Alat untuk survey di lapangan dan untuk untuk Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya	13	buah	35.000	455.000	455.000

2. Bahan perangkat/penunjang						
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Honor Per Tahun (Rp)	
					Tahun I	Tahun II
Perlengkapan TIM	Alat untuk survey di lapangan dan untuk untuk Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya	20	orang	69.250	1.385.000	1.385.000
Transportasi Penelitian Untuk 5 Kota	Alat untuk survey di lapangan dan untuk untuk Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya	10	orang	500.000	5.000.000	5.000.000
Perlengkapan Lain-Lain tak terduga	Alat untuk survey di lapangan dan untuk untuk Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya	100	paket cinderamata	50.000	5.000.000	5.000.000
Jumlah sub total					77.200.000	77.200.000

3. Perjalanan

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Biaya Per Tahun (Rp)	
					Tahun I	Tahun II
	Bandung/Jakarta (2 Hari)					
Transportasi (Bdg – DKI)	Melakukan survey dari Jakarta ke Bandung atau Bandung-Jakarta	13	orang	100.000	1.300.000	1.300.000
Hotel (2 hari):	Melakukan survey dari Jakarta ke Bandung atau Bandung-Jakarta	2	orang	300.000	600.000	600.000
Koordinator Reserach	Melakukan survey dari Jakarta ke Bandung atau Bandung-Jakarta	2	orang	300.000	600.000	600.000
Anggota (2)	Melakukan survey dari Jakarta ke Bandung atau Bandung-Jakarta	2	orang	250.000	500.000	500.000
Mahasiswa (3)	Melakukan survey dari Jakarta ke Bandung atau Bandung-Jakarta	3	orang	135.000	405.000	405.000

3. Perjalanan

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Biaya Per Tahun (Rp)	
					Tahun I	Tahun II
Mahasiswa (3)	Melakukan survey dari Jakarta ke Bandung atau Bandung-Jakarta	3	orang	135.000	405.000	405.000
Mahasiswa (4)	Melakukan survey dari Jakarta ke Bandung atau Bandung-Jakarta	4	orang	100.000	400.000	400.000
Makan	Melakukan survey dari Jakarta ke Bandung atau Bandung-Jakarta(makan pagi, makan siang, makan malam)	26	orang	35.000	910.000	910.000
	Yogyakarta (3 hari)					
Aktivitas survey di Yogyakarta	Transportasi	13	orang	250.000	3.250.000	3.250.000
	Hotel (3 Hari):					
Aktivitas survey di Yogyakarta	Koordinator Reserach	3	orang	300.000	900.000	900.000
Aktivitas survey di Yogyakarta	Anggota (3)	3	orang	250.000	750.000	750.000
Aktivitas survey di yogyakarta	Mahasiswa (3)	3	orang	200.000	600.000	600.000
Aktivitas survey di yogyakarta	Mahasiswa (3)	3	orang	200.000	600.000	600.000
Aktivitas survey di yogyakarta	Mahasiswa (3)	3	orang	200.000	600.000	600.000
Aktivitas survey di yogyakarta	Makan	39	kali	35.000	1.365.000	1.365.000
	Semarang (3 Hari)					
Aktivitas survey di Semarang	Transportasi	13	orang	80.000	1.040.000	1.040.000
	Hotel (3 Hari)					
Aktivitas survey di Semarang	Koordinator Research	3	orang	300.000	900.000	900.000
Aktivitas survey di Semarang	Anggota (2)	3	orang	250.000	750.000	750.000
Aktivitas survey di Semarang	Mahasiswa (3)	3	orang	200.000	600.000	600.000

3. Perjalanan

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Biaya Per Tahun (Rp)	
					Tahun I	Tahun II
Aktivitas survey di Semarang	Mahasiswa (3)	3	orang	200.000	600.000	600.000
Aktivitas survey di Semarang	Mahasiswa (3)	3	orang	200.000	600.000	600.000
Aktivitas survey di Semarang	Makan	39	orang	35.000	1.365.000	1.365.000
	Surabaya (4 Hari)					
Aktivitas survey di Surabaya	Transportasi	13	orang	280.000	3.640.000	3.640.000
	Hotel (3 Hari)					
Aktivitas survey di Surabaya	Koordinator Reserach	4	orang	300.000	1.200.000	1.200.000
Aktivitas survey di Surabaya	Anggota (2)	2	orang	250.000	500.000	500.000
Aktivitas survey di Surabaya	Anggota (4)	4	orang	200.000	800.000	800.000
Aktivitas survey di Surabaya	Anggota (4)	4	orang	200.000	800.000	800.000
Aktivitas survey di Surabaya	Anggota (4)	4	orang	200.000	800.000	800.000
Aktivitas survey di Surabaya	Makan	52	kali	35.000	1.820.000	1.820.000
	Perjalanan Pulang:					
Aktivitas survey di Yogyakarta	Koordinator research	1	orang	650.000	650.000	650.000
Aktivitas survey di Yogyakarta	Anggota	2	orang	650.000	1.300.000	1.300.000
Aktivitas survey di Yogyakarta	Mahasiswa DKI	2	orang	600.000	1.200.000	1.200.000
Aktivitas survey di Yogyakarta	Mahasiswa Bandung	2	orang	500.000	1.000.000	1.000.000
Aktivitas survey di Yogyakarta	Mahasiswa Yogyakarta	2	orang	500.000	1.000.000	1.000.000
Aktivitas survey di Yogyakarta	Mahasiswa Semarang	2	orang	500.000	1.000.000	1.000.000
Aktivitas survey di Yogyakarta	Mahasiswa Surabaya	52	kali	35.000	1.820.000	1.820.000

3. Perjalanan

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Biaya Per Tahun (Rp)	
					Tahun I	Tahun II
Jumlah Sub Total					36.570.000	36.570.000

4. Lain-Lain

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Biaya Per Tahun (Rp)	
					Tahun I	Tahun II
Kegiatan Olah data dan tabulasi Data	Laporan	15	unit	200.000	3.000.000	3.000.000
Kegiatan Olah data dan tabulasi Data	Publikasi	1	kali	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kegiatan Olah data dan tabulasi Data	Seminar	2	kali	2.000.000	4.000.000	4.000.000
Kegiatan Urus HKI	Pendaftaran HKI	1	proses	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Kegiatan Riset	Koordinator Riset	2	orang	50.000	100.000	100.000
Kegiatan Riset Anggota (Bdg-DKI)	Anggota (Bdg-DKI)	2	orang	100.000	200.000	200.000
Kegiatan Riset Mahasiswa (Bdg - DKI)	Mahasiswa (Bdg - DKI)	2	orang	100.000	200.000	200.000
Kegiatan Riset Mahasiswa (Jogja_DKI)	Mahasiswa (Jogja_DKI)	2	orang	130.000	260.000	260.000
Kegiatan Riset Mahasiswa (Smg -DKI)	Mahasiswa (Smg -DKI)	2	orang	142.500	285.000	285.000
Kegiatan Riset Mahasiswa (Sby -DKI)	Mahasiswa (Sby -DKI)	2	orang	200.000	400.000	400.000
Kegiatan Riset Sewa Hotel (2 Hari)	Sewa Hotel (2 Hari)	2	orang	300.000	600.000	600.000
Kegiatan Riset Koordinator Research	Koordinator Research	2	orang	300.000	600.000	600.000
Kegiatan Riset Anggota Research (2)	Anggota Research (2)	2	orang	250.000	500.000	500.000
Kegiatan Riset Mahasiswa (4)	Mahasiswa (4)	4	orang	100.000	400.000	400.000
Kegiatan Riset Mahasiswa (3)	Mahasiswa (3)	2	orang	200.000	400.000	400.000

4. Lain-Lain

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Biaya Per Tahun (Rp)	
					Tahun I	Tahun II
Kegiatan Riset Mahasiswa (4)	Mahasiswa (4)	4	orang	100.000	400.000	400.000
Kegiatan Riset Makan (kordinator dan Anggota)	Makan (kordinator dan Anggota)	39	kali	23.000	897.000	897.000
Jumlah Sub Total					23.242.000	23.242.000



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Kampus Terpadu : Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Yogyakarta 55183
Telp.(0274) 387656 (hunting) Fax. (0274) 387646

LAMPIRAN 4

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan dibawah ini, :

N a m a : Dr. Suryo Pratolo, SE., MSi., Ak
NIDN : 0526067501
Pangkat/Golongan : Penata / III-C
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa, Proposal penelitian saya dengan Judu:

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Desa/Kelurahan Berbasis Web Mendasarkan PP No.37 Tahun 2004 Untuk Mendukung Terwujudnya *Good Government* Pemerintahan dan Kinerja Pemerintah Desa/Desa di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, yang diusulkan dalam skema **USULAN PENELITIAN PRIORITAS NASIONAL MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI(MP3I)-MAKANAN DAN MINUMAN** untuk tahun anggaran 2013 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber/dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Maret 2013



Mengetahui,
Ketua LPPM

Dr. Mukti Fajar, SH., MH
NIK:153.019

Ketua Peneliti,

Dr. Suryo Pratolo, SE., MSi., Ak
NIK : 143.075